

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN
STUNTING DI DESA AEK TANGGA KECAMATAN
GAROGA KABUPATEN TAPANULI UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

DINDA CANTIKA SORMIN

218520026



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/6/25

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN
STUNTING DI DESA AEK TANGGA KECAMATAN
GAROGA KABUPATEN TAPANULI UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh :

DINDA CANTIKA SORMIN

218520026

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2025

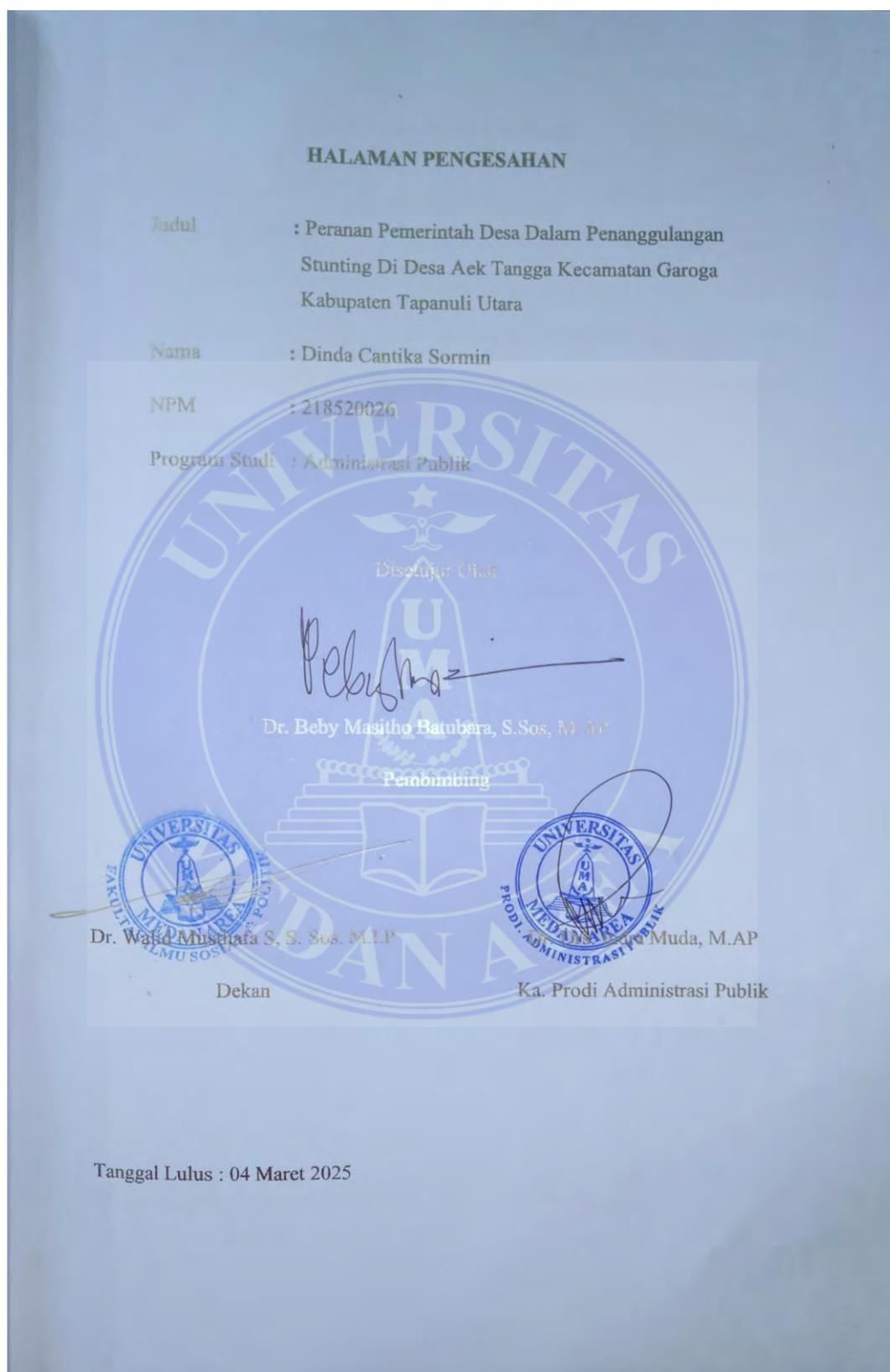
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/6/25



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 Februari 2025



METERAI
TEMPER
14 18AMX279819869

Dinda Cantika Sormin

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinda Cantika Sormin
NPM : 218520026
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Kerja : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA AEK TANGGA KECAMATAN GAROGA KABUPATEN TAPANULI UTARA.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam pangkalan data (*Database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta/ dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Medan

Pada Tanggal : 10 Februari 2025

Yang Menyatakan :



Dinda Cantika Sormin

ABSTRAK

Stunting merupakan suatu permasalahan status gizi kronik pada balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama, sehingga dapat mengakibatkan gangguan tumbuh kembang anak yaitu tinggi badan tidak sesuai atau kurang dari standar usia anak lainnya. Desa Aek Tangga merupakan salah satu desa yang memiliki total stunting tertinggi di Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara dengan total stunting mencapai 17 jiwa, diperlukan peranan pemerintah desa dalam menanggulangi kasus stunting ini. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peranan pemerintah desa dalam penanggulangan stunting di Desa Aek Tangga, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara. Landasan Teori yang digunakan yaitu Teori Suhardhono (2016) peran pemerintah desa dibagi menjadi tiga yaitu, sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Desa Aek Tangga sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator dalam upaya penanggulangan stunting sudah berjalan dengan baik. Pemerintah desa memberikan bantuan makanan tambahan, melakukan imunisasi rutin, menimbang balita setiap bulan, dan bekerja sama dengan petugas puskesmas dan petugas dinas kesehatan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan stunting dan pola hidup sehat. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya infrastruktur kesehatan masih menjadi hambatan terhadap efektivitas program. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi yang lebih besar antara pemerintah, petugas kesehatan dan masyarakat untuk menurunkan angka stunting di desa ini.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Desa, Stunting

ABSTRACT

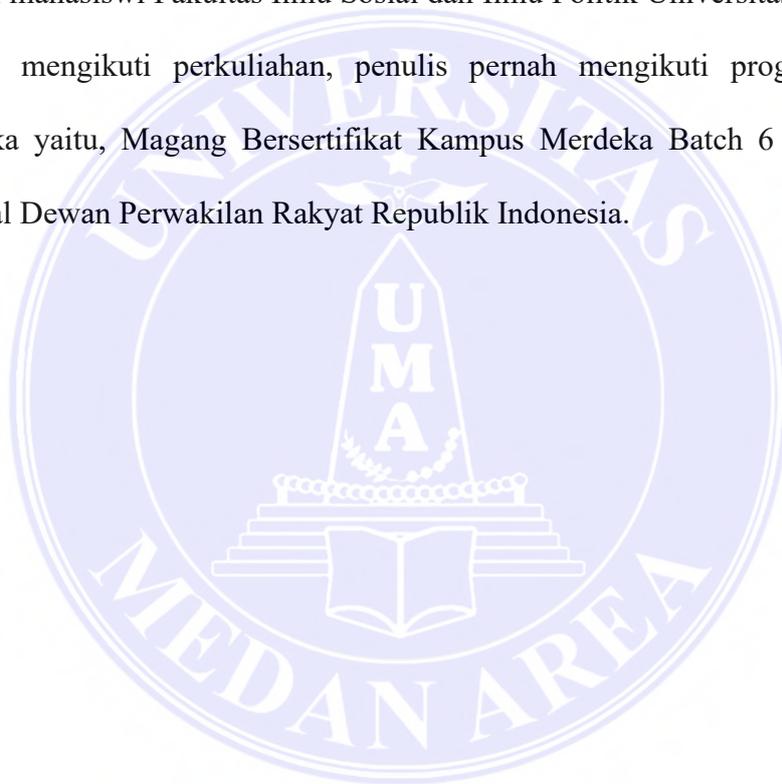
Stunting is a chronic nutritional status problem in toddlers caused by a lack of nutrient intake over a long period, which could lead to impaired child development, namely height not meeting or being below the standard for other children of the same age. Aek Tangga Village was one of the villages with the highest total stunting cases in Garoga Subdistrict, North Tapanuli Regency, with a total of 17 cases. The role of the village government was required in tackling this stunting issue. This research aimed to analyze the role of the village government in tackling stunting in Aek Tangga Village, Garoga Subdistrict, North Tapanuli Regency. The theoretical framework used was Suhardhono's theory (2016), which divided the role of the village government into three: as a facilitator, mobilizer, and regulator. The research method used was a qualitative approach using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The research results showed that the role of the Aek Tangga Village Government as a facilitator, mobilizer, and regulator in stunting reduction efforts had been running well. The village government provided additional food assistance, conducted routine immunizations, weighed toddlers every month, and cooperated with health center officers and health service officers to conduct socialization and education about stunting prevention and healthy lifestyles. Despite various efforts being made, challenges such as low public awareness and lack of health infrastructure still became obstacles to the program's effectiveness. Therefore, greater synergy between the government, health workers, and the community was needed to reduce the stunting rate in this village.

Keywords: Role, Government, Village, Stunting



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Sibaganding, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 14 November 2002 dari ayah Dimpos Sormin dan ibu Roslina Simangunsong. Penulis merupakan anak ke-4 dari 6 bersaudara. Tahun 2021 Penulis lulus dari SMAS HKBP 2 TARUTUNG dan pada tahun 2021 terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah mengikuti program Kampus Merdeka yaitu, Magang Bersertifikat Kampus Merdeka Batch 6 di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah stunting dengan judul **Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting di Desa Aek Tangga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara.**

Terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP selaku pembimbing dan Dr. Drs. Indra Muda, M.AP, Dr. Yarhamdhani, SE, M.SP serta Dr. Drs. Yanhar Jamaluddin, S.Sos, M.AP selaku penguji sidang yang telah banyak memberikan saran dan motivasi. Ungkapan terimakasih juga disampaikan kepada kedua Orang Tua saya Dimpos Sormin dan Roslina Simangunsong, serta saudara-saudara saya yaitu Dewi Sormin, Sayun Sormin, Sulastri Sormin, Tonggotua Sormin serta Martin Sormin yang selalu memberikan dukungan tanpa henti, baik secara moral, material, maupun spiritual. Tanpa cinta, doa dan pengorbanan mereka, saya tidak akan bisa mencapai titik ini. Kalian adalah sumber inspirasi terbesar dalam hidup saya. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada teman-teman dekat dan Kelas A2 (AP21) yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas kebersamaan, canda tawa dan semua bantuan yang telah kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi/tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi/tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 14 Maret 2025

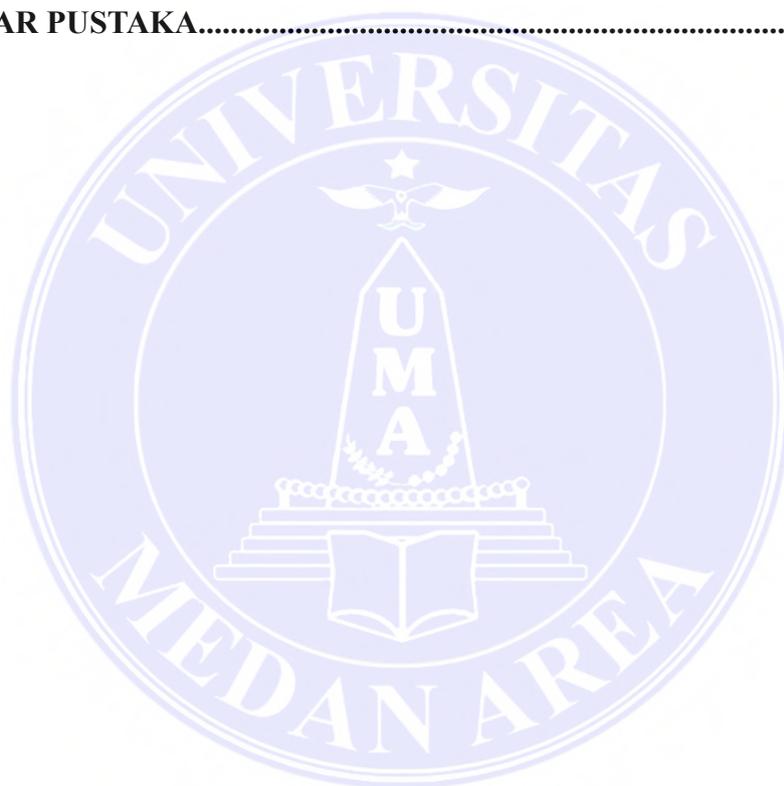


Dinda Cantika Sormin

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Peran	9
2.1.1 Pengertian Peran	9
2.1.2 Aspek-Aspek Peran	11
2.1.3 Dimensi Peran	12
2.2 Pemerintah	14
2.3 Pemerintah Desa	15
2.4 Peran Pemerintah Desa	17
2.5 Stunting	19
2.6 Penanggulangan Stunting	23
2.7 Penelitian Terdahulu	25
2.8 Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.3 Informan Penelitian	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5 Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	41
4.1.1 Gambaran Desa Aek Tangga Kecamatan Garoga	41
4.1.2 Visi dan Misi Desa Aek Tangga	43
4.2 Hasil Penelitian.....	46
4.3 Pembahasan	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77



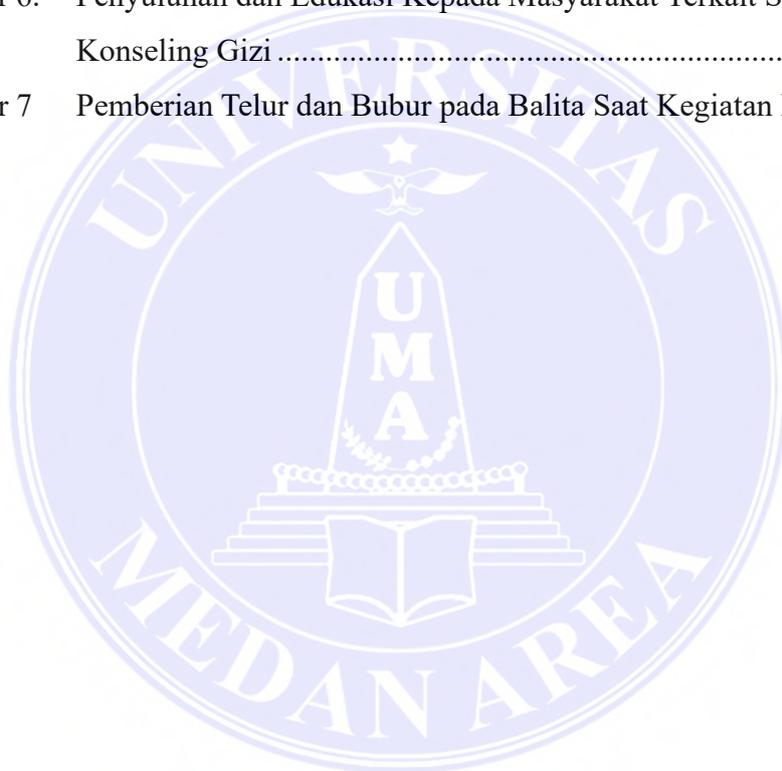
DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Stunting di Kecamatan Garoga.....	5
Tabel 3.	Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 4.	Waktu Penelitian	32
Tabel 5.	Informan Penelitian.....	34
Tabel 6.	Data Demografi Desa Aek Tangga 2024.....	41
Tabel 7.	Pekerjaan Masyarakat Desa Aek Tangga	42
Tabel 8.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Aek Tangga.....	43
Tabel 9.	Sarana dan Prasarana di Desa Aek Tangga 2024	43
Tabel 10.	Nama Balita yang Menderita Stunting di Desa Aek Tangga 2024.....	47
Tabel 11	Nama Balita yang Menderita Stunting di Desa Aek Tangga 2025.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka Pemikiran	30
Gambar 2.	Struktur Kepengurusan Desa Aek Tangga	46
Gambar 3.	Pelaksanaan Kegiatan Posyandu.....	50
Gambar 4.	Pemberian Makanan Tambahan kepada Balita Stunting oleh Kader Posyandu.....	50
Gambar 5.	Pelaksanaan Imunisasi oleh Bidan Desa Setiap Bulannya	54
Gambar 6.	Penyuluhan dan Edukasi Kepada Masyarakat Terkait Stunting dan Konseling Gizi	61
Gambar 7	Pemberian Telur dan Bubur pada Balita Saat Kegiatan Posyandu ..	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali, hal ini menjadi pemicu banyak masalah diberbagai bidang seperti krisis ekonomi, tingginya tingkat kriminalitas, pengangguran, dan berbagai masalah dibidang kesehatan. Masalah kesehatan adalah salah satu hal yang harus disoroti karena kesehatan berkorelasi langsung dengan masalah vital suatu negara. Pada masa kini masalah kesehatan yang sedang marak terjadi dikalangan anak-anak di Indonesia adalah stunting.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan fisik yang terjadi pada balita ditandai dengan penurunan pertumbuhan yang terjadi karena kurangnya asupan gizi seorang anak. Menurut Endy P Prawirohartono (2021:29) stunting merupakan kondisi balita yang tinggi dan berat badannya tidak seimbang, ini terjadi karena asupan gizi yang diberikan pada balita tidak sesuai dengan kebutuhannya. Stunting menunjukkan status kurang gizi pada balita pada masa perkembangan dan pertumbuhannya yang bersifat kronik sejak di dalam kandungan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, stunting diartikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis serta infeksi yang sering terjadi. Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dari standar ideal sesuai usia, sebagaimana ditetapkan oleh menteri kesehatan. Penentuan stunting dilakukan berdasarkan indeks PB/U atau TB/U, di mana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran menunjukkan angka pada ambang batas (Z-

Score) kurang dari -2 SD hingga -3 SD (pendek/*stunted*) dan kurang dari -3 SD (sangat pendek/*severely stunted*). Program percepatan penurunan stunting menargetkan kelompok sasaran, yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia 0 hingga 59 bulan.

Permasalahan kasus stunting merupakan hal yang harus segera di atasi dan tidak bisa diabaikan karena balita yang menderita stunting memberikan dampak yang buruk terhadap masa depan balita dan akan memberi dampak buruk yang berkelanjutan bagi bangsa dan negara. Stunting dapat menghambat tumbuh dan kembang anak yang berakibat seperti penurunan intelektual, rentan terhadap penyakit tidak menular, penurunan produktifitas, prestasi belajar yang kurang dan psikososial yang buruk.

Stunting merupakan suatu kondisi dimana pertumbuhan fisik anak terhambat sehingga anak menjadi lebih pendek dari yang seharusnya. Menurut Maryuni (2024 :1) menyatakan faktor penyebab stunting itu disebabkan oleh 3 hal yaitu, pertama kekurangan nutrisi dalam kandungan, asupan gizi selama kehamilan yang tidak memadai dapat mempengaruhi pertumbuhan janin. Kedua, kekurangan gizi pasca kelahiran, jika anak tidak mendapatkan makanan yang cukup bergizi atau makanan pendamping ASI yang tepat, pertumbuhannya akan terhambat. Ketiga, infeksi dan penyakit, infeksi atau penyakit yang berulang juga mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi secara optimal. Selain itu, faktor lingkungan seperti rendahnya aksesibilitas pangan pada tingkat keluarga terutama pada keluarga miskin, rendahnya sanitasi lingkungan, rendahnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar, dan masih banyak terjadi disparitas antar

provinsi yang perlu mendapat penanganan masalah yang spesifik di wilayah rawan yang menyebabkan stunting.

Stunting meningkatkan risiko kesehatan dan kematian dan perkembangan otak yang tidak optimal yang menyebabkan terhambatnya perkembangan motorik dan buruknya perkembangan mental. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lia (2022:6) menunjukkan bahwa risiko yang ditimbulkan oleh stunting antara lain menurunnya prestasi akademik, peningkatan risiko obesitas, peningkatan kerentanan terhadap penyakit tidak menular, dan peningkatan risiko penyakit degeneratif.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dalam Redaksi Sehat Negeriku.com (2023) pada tahun 2023 jumlah balita di Indonesia mencapai 30,2 juta jiwa, dengan angka prevalensi stunting sebesar 21,5% atau setara dengan 6,34 juta anak. Meskipun angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan bahwa angka stunting harus berada di bawah 20% agar tidak dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat yang serius. Secara nasional, pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan dalam databoks.katadata.co.id, pada tahun 2021 Indonesia memiliki angka prevelensi penderita stunting sebesar 24%, merespon hal ini pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini menjadi wujud komitmen pemerintah

dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting menjadi 14% sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Penelitian yang dilakukan oleh Dhea Jayanti (2021:2) menyatakan bahwa stunting lebih sering ditemukan di daerah-daerah tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang tinggi akibat orang tua yang tidak memiliki kesanggupan dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga hal inilah yang terjadi di daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Menurut Pejabat (Pj) Bupati Taput dalam rri.co.id (2024) Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang memiliki kasus stunting yang cukup tinggi.

Kasus stunting di daerah Tapanuli Utara mencapai 27,4% dan hal ini masih sangat jauh dari target yang ditentukan oleh pemerintah di tahun 2024 yaitu sebesar 14%. Untuk menekan angka stunting, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan berbagai upaya seperti melaksanakan pelatihan bagi para pemangku kepentingan, seperti kader posyandu, penyuluh keluarga berencana (PKB), kepala puskesmas, dan penyuluhan program lainnya yang dapat membantu penanggulangan stunting serta melakukan *monitoring* secara terus menerus dan juga pemberian makanan tambahan (PMT).

Stunting yang masih belum terkendali di Kabupaten Tapanuli Utara membuat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara membentuk Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Stunting. Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran pada APBD untuk melaksanakan kegiatan *intervensi*

penurunan stunting di tingkat desa. Melalui peraturan ini diharapkan dapat mendukung dan menanggulangi stunting di tiap desa.

Kabupaten Tapanuli Utara masih di dominasi oleh daerah tertinggal dan terbelakang, salah satunya adalah Kecamatan Garoga. Garoga merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara yang masih memiliki kasus stunting yang tinggi. Data stunting di Kecamatan Garoga dari 3 tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 tercatat ada 67 orang di bulan Januari, tahun 2023 tercatat ada 74 di bulan Januari, dan pada tahun 2024 tercatat ada 99 balita di bulan Januari.

Tabel 1. Jumlah Stunting di Kecamatan Garoga

Tahun	Jumlah Stunting
2022	67
2023	74
2024	99

Sumber : Data Puskesmas Garoga

Merujuk data rekapan dari hasil prapenelitian pada data Puskesmas Garoga, terjadi peningkatan angka stunting secara terus menerus yang signifikan dari tahun sebelumnya sampai tahun ini, dan hal ini memberi tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan *intervensi* dalam menanggulangi angka stunting. *Intervensi* ini harus ditunjukkan dengan aksi nyata dan perealisasi program-program pemerintah dalam menekan angka stunting dengan mengoptimalkan bantuan dana pemerintah untuk setiap desa di Indonesia.

Tabel 2. Jumlah Balita Stunting Di Kecamatan Garoga Januari 2024

No	Desa	Jumlah
1	Aek Tangga	17 orang
2	Parinsoran	16 orang
3	Padang Siandomang	10 orang
4	Garoga Sibargot	9 orang
5	Parsosoran	9 orang
6	Gonting Garoga	8 orang

7	Gonting Salak	8 orang
8	Sibalanga	5 orang
9	Lontung Jae II	4 orang
10	Simpang Bolon	4 orang
11	Lontung Jae I	3 orang
12	Parmanuhan	3 orang
13	Sibaganding	3 orang
TOTAL		99 orang

Sumber : Data Puskesmas Garoga

Merujuk pada data yang disediakan pada tabel 2, bahwa Kecamatan Garoga terdiri dari 15 Desa yang setiap desa memiliki kasus stunting. Desa Aek Tangga menjadi desa yang memiliki kasus stunting tertinggi di Kecamatan Garoga. Desa Aek Tangga memiliki jumlah balita sebanyak 131 jiwa dan 17 anak diantaranya mengalami stunting. Berdasarkan hasil dari prapenelitian ditemukan bahwa banyaknya kasus stunting pada balita di Desa Aek Tangga di landasi oleh rendahnya pemenuhan gizi pada balita dan ibu pada saat sebelum dan sesudah melahirkan serta pola asuh dan lingkungan yang buruk karena dipengaruhi oleh keterbatasan perekonomian masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi atau penyuluhan yang diadakan pemerintah terkait pola hidup sehat. Hal inilah yang menuntut peran aktif dari pemerintah dalam menanggulangi stunting dengan membuat program-program yang akan menjadi solusi dari faktor-faktor penyebab stunting.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan tingginya jumlah kasus stunting di Desa Aek Tangga, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting di Desa Aek Tangga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada permasalahan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Aek Tangga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Aek Tangga Kecamatan Garoga Kabupaten Garoga Tapanuli Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai karya ilmiah yang memberikan referensi tambahan terhadap pemerintah dalam menanggulangi kasus stunting di Desa Aek Tangga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Desa Aek Tangga

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk membuat kebijakan dalam menanggulangi stunting

b) Bagi Masyarakat Desa Aek Tangga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Aek Tangga terkait stunting serta menumbuhkan kesadaran orangtua bagi anaknya yang mengalami stunting maupun tidak stunting

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah peran berarti pemain sandiwara (film), perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan di masyarakat. Peran merupakan seperangkat tindakan yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran diartikan sebagai seseorang yang melaksanakan kewajibannya sesuai kedudukan dan status yang dimilikinya. Menurut Abdulsyani (2007:94) peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan melakukan cara tertentu dalam menjalankan haknya serta kewajiban yang dimilikinya sesuai dengan kewajiban dan statusnya. Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero (2014:558) mengemukakan teori peran sebagai berikut :

a) Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif adalah peran yang dimandatkan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui dan menghargai kerja dan kontribusi yang dimiliki orang lain baik pihak individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan produktifitas. Menurut Jim Ife (2014:558), bahwa peran itu memiliki tujuh peran khusus, yaitu animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberian dukungan, membentuk konsensus, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumber daya dan mengorganisasi.

b) Peran Edukasi

Peran edukasi adalah peran yang tidak hanya melaksanakan proses peningkatan produktivitas, melainkan berperan aktif juga dalam menerima segala saran dan masukan yang membangun dengan tujuan menambah ilmu pengetahuan serta keterampilan dan pengalaman bagi setiap masyarakat. Peran edukasi ini dilakukan dengan pelatihan terhadap masyarakat dan melakukan sosialisasi.

c) Peran Representasional

Peran representasional adalah suatu peran yang dilakukan dengan menjalin interaksi dengan berbagai pihak yang bersifat membangun dan mewakili masyarakat untuk tujuan yang lebih baik.

d) Peran Teknis

Peran teknis adalah peran yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk melakukan pengumpulan dan analisis data, kemampuan menggunakan komputer, presentasi baik lisan maupun tulisan, manajemen dan pengendalian uang serta melakukan penilaian untuk kebutuhan potensial individu, kelompok dan masyarakat.

Peran yang dimainkan oleh seorang atasan, menengah, maupun bawahan pada hakikatnya tidak ada perbedaan akan memiliki peran yang sama. Menurut Soerjono Soekanto (2002) Peran dibagi menjadi tiga yaitu peran aktif, partisipatif dan peran pasif, peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

a) Peran aktif

Peran aktif adalah peran yang dimainkan oleh anggota kelompok yang berkedudukan sebagai aktivitas kelompok. Contohnya seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.

b) Peran partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang dimainkan oleh anggota kelompok dengan memberikan sumbangan kepada kelompoknya sendiri.

c) Peran pasif

Peran pasif artinya anggota kelompok yang berperan sebagai anggota yang pasif yang memberikan kesempatan kepada anggota kelompok lainnya kesempatan berkontribusi fungsi-fungsi dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.

2.1.2 Aspek-Aspek Peran

Peran adalah aspek dinamis dari status atau kedudukan yang dimiliki seseorang apabila melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal ini menunjukkan bahwa peran telah dilaksanakan jika sudah melakukan kewajiban-kewajibannya dalam suatu kedudukan atau kekuasaan. Menurut Soekanto (2006:212) Peran dibagi menjadi tiga cakupan yaitu :

a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dalam masyarakat. Peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dikontribusikan oleh seseorang terhadap masyarakat sebagai organisasinya.

- c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai tindakan atau perilaku seseorang yang bermanfaat bagi struktur sosial masyarakat.

2.1.3 Dimensi Peran

Peran adalah aspek dinamis dari status atau kedudukan yang dimiliki seseorang apabila melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Heroepoetri, Arimbi dan Santosa dalam Gunawan et al.,(2019) membagi peran menjadi 5 bagian, yaitu :

1. Peran Sebagai Suatu Kebijakan

Peran sebagai suatu kebijakan diartikan sebagai bahwa peran ini merupakan kebijakan yang baik dan tepat dilaksanakan.

2. Peran Sebagai Alat Komunikasi

Peran sebagai alat komunikasi merupakan peran yang digunakan sebagai instrumen atau alat dalam mengambil keputusan. Persepsi ini didasari oleh bahwa peran yang dilakokan oleh pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat merupakan suatu masukan yang akan berguna dalam mewujudkan keputusan secara refrensif.

3. Peran Sebagai Alat Strategi

Peran sebagai alat strategi artinya bahwa peran merupakan strategi yang dilakukan dalam mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini didasari pada paham suatu kepedulian dan keputusan masyarakat pada setiap tingkatan keputusan yang didokumentasikan dengan baik, maka artinya keputusan tersebut memiliki kredibilitas.

4. Peran Sebagai Terapi

Peran sebagai teori dalam hal ini artinya bahwa peran sebagai cara dalam mengatasi permasalahan psikologis masyarakat seperti haknya rasa ketidakberdayaan, rasa ketidakperceyadirian dan perasaan bahwa mereka tidak komponen penting dalam masyarakat.

5. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Peran dipercaya dapat menjadi alat untuk mengurangi dan menghilangkan konflik yang terjadi melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.

Setiap peranan memiliki tujuan untuk mempunyai hubungan antara individu dengan orang-orang yang berhubungan dengan peranannya tersebut dan hubungan yang dijalin diatur oleh nilai-nilai sosial yang harus ditaati dan diterima oleh kedua belah pihak. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa peran itu adalah suatu sikap dan perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menjalankan kewajiban yang dimiliki.

Peran merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh pihak yang telah terorganisasi yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam organisasi atau lingkungan masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas jika dihubungkan antara peranan pemerintah desa dalam menanggulangi angka stunting kepada masyarakat desa adalah tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu yang harus dijalankan, akan tetapi juga merupakan tugas wewenang yang harus dimiliki pemerintah desa dalam memberikan layanan terhadap masyarakat terkhusus balita yang mengalami stunting.

2.2 Pemerintah

Pemerintah adalah sistem untuk menjalankan suatu wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan suatu negara baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan dan tanggungjawab yang sama untuk menggunakan kekuasaan. Pemerintah juga dapat diartikan sebagai lembaga atau badan dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan memerintah. Pemerintah adalah suatu organisasi yang memiliki kekuatan yang besar dalam suatu negara yang mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian pemerintah adalah suatu lembaga atau badan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang besar dalam mencapai tujuan suatu negara. Dalam menjalankan tujuan negara untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyat maka pemerintah yang berwenang akan hal itu yang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap masyarakat.

Pemerintah memiliki 2 pengertian, yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Menurut Manan dalam Astomo (2014) pemerintah dalam arti luas memiliki arti penyelenggaraan kekuasaan negara yang mencakup tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jabatan ini menggambarkan bahwa suatu lingkungan kerja tetap memiliki wewenang tertentu, sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah penyelenggaran kekuasaan eksekutif dalam suatu negara, sedangkan fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah itu berkaitan dengan:

1. Badan-badan publik yang memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan jasa atau layanan melalui privatisasi)/otorisasi.
2. Pemerintah dalam arti luas memiliki arti yang meliputi *Trias Politica* (legislatif,eksekutif, dan yudikatif).
3. Tingkatan pemerintah itu dimulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

2.3 Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada pasal 1 ayat 3 dijelaskan juga bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain Perangkat Desa sebagai yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala desa dan perangkat desa saling membantu menyelenggarakan pemerintahan di desa agar fungsi dan perannya berjalan dengan baik, karena kepala desa tidak mungkin untuk menjalankan tugasnya sendirian.

Pemerintah desa adalah sebuah organisasi yang terdiri atas :

1. Kepala Desa
2. Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa) yang terdiri atas sekretaris desa yang akan membantu dalam urusan pelayanan/administrasi di desa

3. Unsur teknis yaitu unsur yang berfungsi untuk membantu kepala desa dalam urusan teknis yang berurusan dilapangan seperti halnya keagamaan, pengairan, dan lainnya
4. Unsur kewilayahan yaitu unsur yang membantu kepala desa dalam mengurus wilayah yang ada di dalam desa seperti kerjanya kepala dusus yang memegang sebuah wilayah dan bertanggungjawab atas wilayah tersebut.

Oleh karena itu, dilihat dari segi fungsi maka pemerintah desa memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
2. Melaksanakan pembangunan desa dan pembinaan terhadap masyarakat
3. Melaksanakan pembinaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
4. Melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong masyarakat
5. Melaksanakan pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat
6. Melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan juga bahwa BPD merupakan mitra pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa BPD memiliki wewenang, yaitu :

1. Membantu rancangan peraturan desa bersama kepala desa

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan desa dan peraturan kepala desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Menyusun tata tertib BPB.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam berperan aktif untuk menanggulangi kasus stunting pada balita serta melibatkan pihak masyarakat seperti posyandu dan sebagainya dengan menggunakan dana desa.

2.4 Peran Pemerintah Desa

Suhardono (2016:18) mengemukakan bahwa peran adalah patokan yang membatasi seseorang untuk melakukan tindakan dalam menduduki kekuasaannya. Adapun peran pemerintah desa dibagi menjadi tiga bagian yaitu adalah:

1. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Kata fasilitator berasal dari kata “Fasilitas”, menurut Kotler (2016:75) fasilitas merupakan segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen. Jadi fasilitas adalah sumber daya fisik yang ada dalam sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada konsumen. Pemerintah sebagai fasilitator artinya peran yang dilakukan pemerintah dalam menunjang

berbagai kepentingan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam mengoptimalkan pembangunan desa.

Peran Pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah dapat melakukan berbagai pendampingan dalam pelatihan, peningkatan keterampilan, pendidikan, serta dibidang pendanaan melalui memberikan sumbangan atau bantuan kepada masyarakat berupa modal. Dari pengertian diatas, pemerintah sebagai fasilitator artinya orang yang mempersiapkan berbagai fasilitas kepada yang membutuhkan baik dalam bentuk fisik maupun kegiatan-kegiatan pembangunan desa, memberikan kelancaran dan kemudahan saat pelaksanaan program-program desa, sehingga proses pembangunan yang berjalan dapat dikerjakan dengan baik. Pemerintah juga dapat menjadi narasumber ketika berbagai permasalahan timbul.

2. Pemerintah Sebagai Mobilisator

Kata mobilisator berasal dari kata “Mobilisasi”, menurut Ignatavicius, Workman & Rebar, (2017:45) mobilisasi adalah kemampuan individu untuk melakukan gerakan fisik yang disengaja dari tubuh. Ketika seseorang mampu bergerak, mobilisator mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Mobilisator artinya orang yang menggerakkan atau mengarahkan banyak orang untuk melakukan sesuatu yang berkaitan untuk pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu pemerintah yang berperan sebagai mobilisator yaitu kepala desa yang mengajak atau menggerakkan masyarakat untuk secara bersama-sama melakukan perubahan dan pembangunan ke arah yang lebih baik lagi untuk kepentingan bersama.

3. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator artinya pemerintah menerbitkan peraturan-peraturan bagi masyarakat sebagai arah dalam menyeimbangkan penyelenggaraan proses pembangunan dan efektifitas tata tertib administrasi pembangunan. Untuk memastikan bahwa stunting harus diatasi di Indonesia maka pemerintah sekarang melanjutkan upaya di bawah komando Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara No 49 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Stunting. Pemerintah akan terus melakukan program dalam menurunkan stunting agar target yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 14% pada tahun 2024 dapat tercapai.

2.5 Stunting

Stunting merupakan permasalahan status gizi kronis pada balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama, sehingga bisa mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu tinggi badan yang tidak sesuai atau kurang dari standar usia pada anak lainnya. Stunting juga dapat diartikan sebagai kondisi gagal tumbuhnya bayi (0-11 bulan) dan anak balita (12-59 bulan) akibat dari kurangnya gizi yang di konsumsi terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sehingga mengalami gangguan di pertumbuhan tinggi badannya. Menurut Zakiyah Nurul (2021:3) pada penelitian yang dilakukan sebelumnya kekurangan gizi sejak dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir masih belum terlihat, tetapi kondisi stunting baru akan terlihat ketika anak berusia 2 tahun.

Kondisi tubuh pada balita yang pendek seringkali dikatakan karena faktor gen atau keturunan dari orang tua, sehingga banyak masyarakat kurang peduli atau hanya menerima keadaanya saja tanpa cari tau bagaimana cara menanggulangnya. Genetika itu merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya apabila dibandingkan dengan faktor lainnya seperti perilaku, lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan politik serta pelayanan kesehatan yang tersedia. Selain terlihat dari fisik saja yaitu struktur tubuh, stunting juga dapat mengakibatkan penyerapan pengetahuan dan kognitif. Stunting memiliki banyak penyebab yang kompleks, dan seringkali merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berhubungan. Beberapa penyebab stunting menurut Maryuni (2024:5) dibagi menjadi 9 yaitu, kekurangan gizi, gizi ibu selama masa kehamilan, berat badan lahir rendah, pola makan yang buruk, penyakit infeksi, faktor lingkungan, faktor sosio ekonomi, faktor genetik.

1. Kekurangan Gizi

Kurangnya asupan gizi yang memadai, terutama protein, zat besi, vitamin A, vitamin D, dan kalsium dapat menghambat pertumbuhan anak-anak.

2. Gizi Ibu Selama Masa Kehamilan

Kekurangan gizi pada ibu selama kehamilan dapat mempengaruhi pertumbuhan janin dan menyebabkan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah yang meningkatkan risiko stunting di kemudian hari.

3. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat badan lahir rendah atau sering disebut dengan BBLR adalah bayi dengan berat badan lahir kurang dari 2.500 gram. Berat badan lahir rendah bisa disebabkan oleh keadaan gizi ibu yang kurang selama kehamilan.

Masalah jangka panjang yang disebabkan oleh BBLR adalah terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan.

4. Pola Makan Yang Buruk

Kebiasaan makan yang tidak sehat, termasuk konsumsi makanan yang rendah gizi dan tinggi lemak, gula, dan garam dapat menyebabkan stunting jika terjadi dalam jangka waktu yang lama.

5. Penyakit Infeksi

Penyakit kronis, infeksi kronis, atau penyakit yang menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi juga dapat menghambat pertumbuhan anak-anak.

6. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk, akses terbatas ke air bersih, sanitasi yang buruk, dan kebiasaan hidup yang tidak sehat dapat memperburuk kondisi gizi dan menyebabkan stunting.

7. Faktor Sosio Ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan kurangnya pendidikan tentang gizi dan perawatan anak dapat menjadi faktor risiko untuk stunting.

8. Faktor Genetik

Beberapa kasus stunting mungkin juga disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan, meskipun faktor ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya.

Kekurangan gizi pada anak berdampak secara akut dan kronis. Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi akut akan terlihat lemah secara fisik. Anak yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama atau kronis, terutama

yang terjadi sebelum usia dua tahun, akan terhambat pertumbuhan fisiknya sehingga menjadi pendek (*stunted*). Menurut Mardiani Mangun (2023 : 39) adapun dampak stunting yaitu, kognitif lemah dan psikomotorik terhambat, kesulitan menguasai sains dan teknologi, lebih mudah terkena penyakit *degenerative*, serta sumber daya manusia berkualitas rendah.

- a. Kognitif lemah dan psikomotorik terhambat menunjukkan anak yang tumbuh dengan stunting mengalami masalah perkembangan kognitif dan psikomotor. Jika proporsi anak yang mengalami kurang gizi, gizi buruk, dan stunting besar dalam suatu negara, maka akan berdampak pula pada proporsi kualitas sumber daya manusia yang akan dihasilkan. Artinya, besarnya masalah stunting pada anak hari ini akan berdampak pada kualitas bangsa masa depan. Anak dengan stunting mengalami 7% penurunan perkembangan kognitif dan nilai matematikanya lebih rendah 2,11 dibanding anak yang tidak stunting. Stunting memiliki pengaruh negatif terhadap kemampuan kognitif anak yang berdampak pada kurangnya prestasi belajar.
- b. Kesulitan menguasai sains dan berprestasi dalam olahraga anak-anak yang tumbuh dan berkembang tidak proporsional hari ini, pada umumnya akan mempunyai kemampuan secara intelektual di bawah rata-rata dibandingkan anak yang tumbuh dengan baik. Generasi yang tumbuh dengan kemampuan kognisi dan intelektual yang kurang akan lebih sulit menguasai ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi karena kemampuan analisis yang lebih lemah.
- c. Lebih mudah terkena penyakit degeneratif

Kondisi stunting tidak hanya berdampak langsung terhadap kualitas intelektual bangsa, tapi juga menjadi faktor tidak langsung terhadap penyakit degeneratif (penyakit yang muncul seiring bertambahnya usia).

d. Sumber daya manusia berkualitas rendah

Kurang gizi dan stunting saat ini, menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia usia produktif. Masalah ini selanjutnya juga berperan dalam meningkatkan penyakit kronis degenerative saat dewasa. Saat anak beranjak dewasa, stunting juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja di tempat kerja. Orang dewasa dengan riwayat stunting terbukti kurang produktif di tempat kerja yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan mereka. Hal ini tidak terjadi pada sekelompok orang dewasa yang tidak mengidap stunting saat masih anak-anak.

2.6 Penanggulangan Stunting

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang artinya mengatasi, menghadapi, sehingga pengertian dari kata penanggulangan adalah proses atau cara mengatasi atau mengdapai suatu masalah. Penanggulangan stunting merupakan salah satu tujuan dari *SDGS* yaitu program yang ke dua Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*), artinya setuap individu akan terpenuhi nutrisinya, ketahanan pangan akan tercapai, serta budidaya pertanian yang berkelanjutan akan terdorong.

Pemerintah dalam menanggulangi permasalahan stunting melakukan penanganan stunting melalui 2 *Intervensi* yaitu *Intervensi Spesifik* dan *Intervensi sensitif*. Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara No 49 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Stunting, *intervensi spesifik* adalah *intervensi* yang berhubungan

dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Sedangkan *intervensi sensitif* adalah *intervensi* pendukung untuk penurunan kecepatan stunting.

Beberapa kegiatan *intervensi spesifik* yang dilakukan adalah :

1. *Intervensi* dengan sasaran ibu hamil
 - a. Memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya
 - b. Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat bagi ibu hamil
 - c. Mengatasi kekurangan iodium
 - d. Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil
 - e. Melindungi ibu hamil dari malaria
2. *Intervensi* pada sasaran ibu menyusui dan anak pada umur 0-6 bulan :
 - a. Mendorong ibu yang baru melahirkan agar langsung memberikan asi (*colostrum*)
 - b. Mendorong pemberian ASI eksklusif
3. *Intervensi* dengan sasaran Ibu Menyusui dan anak usia 7-23 bulan
 - a. Penyediaan obat cacing
 - b. Memberikan imunisasi lengkap
 - c. Menyediakan suplementasi zink
 - d. Mendorong ibu agar tetap memberikan ASI eksklusif hingga umur 2 tahun

Selain cara diatas adapun kegiatan yang dilakukan pada *intervensi sensitif* penanggulangan stunting yaitu :

- a. Memastikan dan menyediakan air bersih
- b. Memastikan dan menyediakan akses pada sanitasi

- c. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB)
- d. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi
- e. Menyediakan jaminan kesehatan atau BPJS
- f. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya penanganan stunting, pola hidup yang sehat, dan pengelolaan makanan, sehingga masyarakat dapat terus berpartisipasi dalam program penanganan stunting.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu di gunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian ini yang tentunya berkaitan dengan Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting di Desa Aek Tangga, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan ini sebagai berikut :

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

NO	Nama/ Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1.	Nurul Zakiya/ 2021	Upaya Puskesmas dalam Penanggulangan Stunting di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 10 program yang dijalankan oleh Puskesmas dalam penanggulangan stunting ini hanya berjalan 3 program diantaranya yaitu, pertama program pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan edukasi kepada kader posyandu melalui sosialisasi dan penyuluhan. Kedua, perawatan dan pendampingan terhadap ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui. Ketiga, penyediaan dan pemantauan makanan tambahan kepada bayi, balita dan anak sekolah untuk peningkatan gizi.	Penelitian ini berfokus ke dalam bagaimana upaya dari puskesmas dalam penanggulangan stunting sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peranan dari pemerintah desa dalam penanggulangan stunting di Desa Aek Tangga, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara.	Persamaan penelitian ini yaitu berfokus dalam penanggulangan stunting
2.	Eti Klasia Juliyanti/2022	Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Provinsi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah desa dalam penanggulangan stunting masih belum jelas karena pengalokasian anggaran terkait alat-alat yang digunakan oleh kader posyandu masih terbatas, kesediaan masyarakat	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada bagaimana kebijakan dari pemerintah desa dalam menanggulangi stunting sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus untuk melihat	Persamaan menggunakan topik yang sama terkait stunting

		Kalimantan Barat	mengenai stunting masih kurang. Trans paransi pemerintah desa terkait anggaran stunting sangat ter batas serta sulitnya dalam mengakses informasi terkait dana desa yang digunakan dalam penanggulangan stunting ini.	peran dari pemerintah dalam menjalankan prog ram yang di tentukan da lam menang gulangi stun ting	
3.	Minggu s Carlos Zondha \2023	Peran Pemerintah Desa Dalam Menurunkan Stunting (Studi Di Desa Pubasu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah).	Berdasarkan pene litian yang telah dilakukan diketahui bahwa peran peme rintah Desa Pubasu meliputi diantaranya pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak-anak stunting selama tiga bulan dengan ang garan belanja penang anan sebesar 55, 224 juta untuk 90 hari secara efektif. Ada pun faktor pendu kung pelaksanaan pelaksanaan stunting ini adalah adanya pendanaan yang dibe rikan, sedangkan faktor penghambatnya ada lah kurangnya partisi pasi dari masyarakat.	Penelitian ter dahulu meng gunakan Teo ri Bintoro Tjo kroamidjojo (2014) yaitu Pemerintah desa menurut sebagai moti vator, fasili sator dan mo bilisator.Seda ngkan pene litian yang akan dilaku kan menggu nakan teori Suhardhono (2016) Peran Pemerintah desa yaitu, fasilitator, mobilisator dan regulator	Persamaan mengguna kan topik yang sama terkait stunting
4.	Dhea Jayanti Pratiwi/ 2023	Strategi Pencegahan Stunting di Kecamatan Medan Timur Kota Medan.	Hasil penelitian ini yang dilakukan diketahui bahwa penurunan <i>prevelensi stuting</i> di Kecamatan Medan Timur bukan karena keberhasilan dari program D'GINTING mel ainkan karena si anak	Penelitian ter dahulu ber fokus dalam melihat stra tegi dalam pencegahan stunting sedangkan penelitian yang akan	Persamaan mengguna kan topik yang sama terkait stunting

			<p>sudah lebih dari 5 tahun (bukan lagi balita). Secara pelaksanaan diketahui program D'GINTING kurang efektif namun tetap memberikan dampak positif pada pemenuhan nutrisi anak. Faktor penghambat dari pencegahan stunting di Kecamatan Medan Timur adalah ketidaksiapan anggaran, sarana dan prasarana serta sosialisasi yang tidak maksimal.</p>	<p>dilakukan untuk melihat peran dari pemerintah dalam penanggulangan stunting. Teori yang digunakan juga berbeda yaitu penelitian terdahulu menggunakan teori strategi sedangkan penelitian sekarang menggunakan teori peran.</p>	
5.	Selfi Sukaesi \2024	Peran Pemerintah dalam Pengendalian Stunting di Desa Laiya Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.	<p>Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pemerintah yang berperan sebagai fasilitator telah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik dalam program pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita agar terbebas dari gizi buruk. Peran pemerintah sebagai fasilitator cukup baik dalam menjalankan program edukasi dan menginspirasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dalam mencegah kasus stunting. Ketiga peran pemerintah sebagai regulator juga telah dilaksanakan dengan baik karena</p>	<p>Perbedaan penelitian terletak pada lokasi yang diteliti. Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Laiya, Kecamatan Canrana, Kabupaten Maros, Sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Desa aek Tangga, Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara</p>	<p>Persamaan menggunakan topik yang sama terkait stunting.</p>

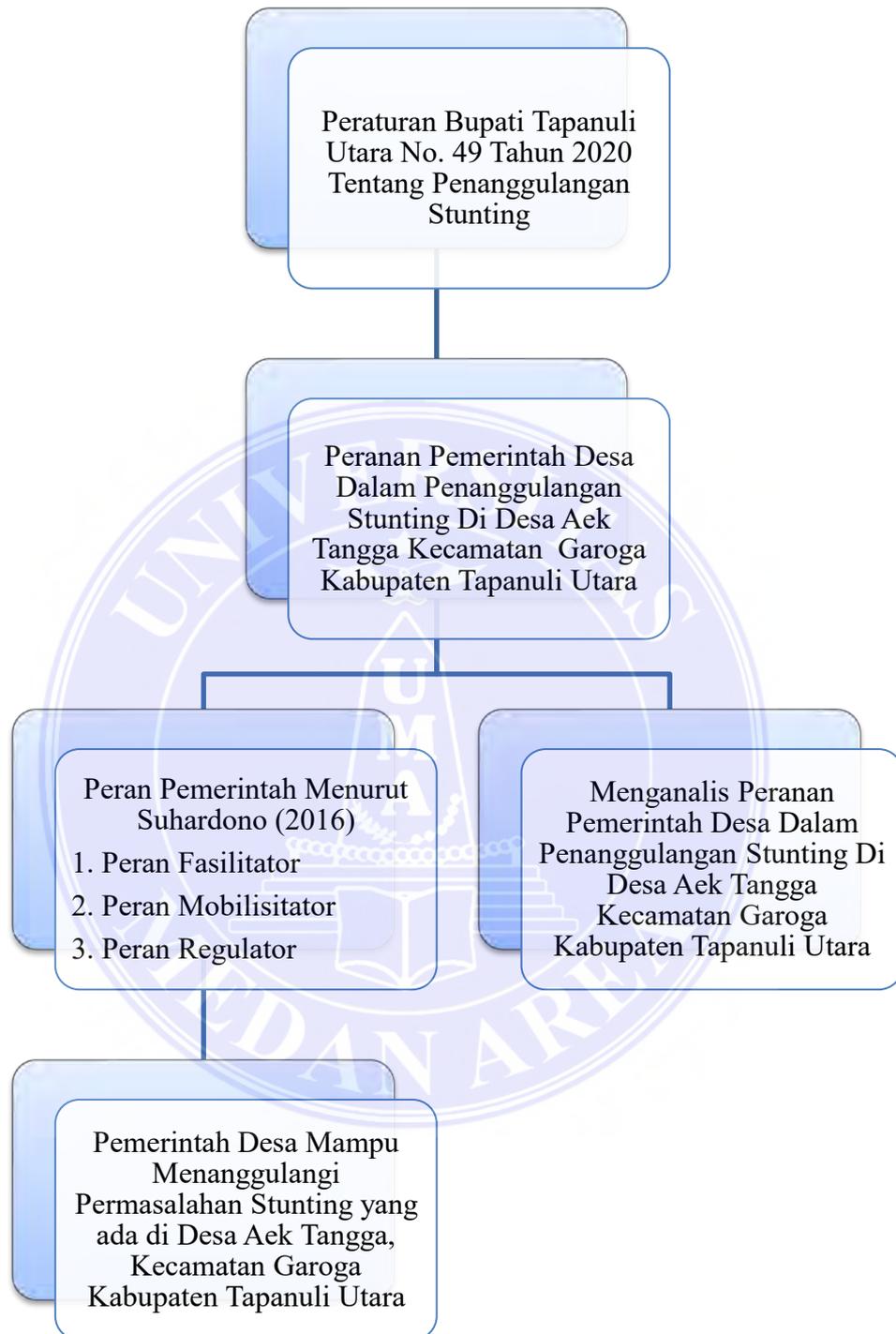
			telah memandu pelaksanaan dalam upaya penurunan stunting.		
--	--	--	---	--	--

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah pernyataan atau uraian mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang dirumuskan. Kerangka pemikiran bisa diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2015:17), kerangka pemikiran adalah model konseptual yang mengaitkan antara teori yang digunakan dengan beberapa faktor penyebab yang telah diidentifikasi menjadi suatu permasalahan. Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dari tingginya kasus stunting di Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 49 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Stunting.

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran APB Desa untuk melaksanakan *intervensi* penurunan *stunting* di tingkat desa. Melalui Peraturan ini maka Pemerintah Desa memiliki peran dalam menanggulangi *stunting* di tiap wilayah desa yang dipimpin. Menurut Suhardhono (2016:18) peran pemerintah desa dibagi menjadi tiga bagian yang meliputi : Peran Fasilitator, Peran Mobilisator, dan Peran Regulator. Untuk menanggulangi permasalahan stunting yang ada di Desa Aek Tangga, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli diperlukan Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator, melalui ke tiga peran ini diharapkan mampu mengatasi kasus stunting di Desa Aek Tangga.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Endang Widi Winarni (2021:146) pendekatan kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan strategi *inquiry* yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, gejala, karakteristik, maupun deskripsi tentang suatu fenomena yang terjadi yang bersifat ilmiah dan holistik, mengutamakan kualitas data, serta disajikan secara naratif. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji kebenaran suatu teori, namun mengembangkan teori yang sudah ada dengan mengumpulkan data yang tersedia.

Secara sederhana penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memberikan jawaban terhadap suatu fenomena melalui prosedur ilmiah secara sistematis. Jenis penelitian ini digunakan karena mampu memaparkan situasi dan peristiwa, serta mendeskripsikan secara rinci mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan. Penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang otentik mengenai pengalaman orang-orang sebagaimana dirasakan.

Menurut Moleong (2013) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bisa digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan

sosial, atau hubungan kekerabatan. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif maka dapat menggambarkan bagaimana peranan dari pemerintah desa dalam penanggulangan stunting di Desa Aek Tangga.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang berjudul Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting ini dilakukan di Desa Aek Tangga, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara. Lokasi penelitian didasarkan karena kasus di wilayah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya yakni berjumlah 17 orang.

Tabel 4. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025
1	Pengajuan Judul						
2	Penyusunan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Perbaikan Proposal						
5	Pengambilan Data Penelitian						
6	Penyusunan Skripsi						
7	Seminar Hasil						
8	Perbaikan Skripsi						
9	Sidang Meja Hijau						

Sumber : diolah peneliti

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang menyajikan dan menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa yang terjadi kepada peneliti untuk dikaji lebih dalam. Informan diharuskan memahami secara jelas masalah atau objek yang dikaji

agar memastikan bahwa data yang disampaikan akurat. Pemilihan informan pada penelitian ini didasarkan pada peninjauan bahwa informan penelitian memiliki profesi faktual dan relevan yang mampu menjelaskan informasi secara detail.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Aek Tangga dan tenaga kesehatan seperti Bidan Desa Aek Tangga serta kader posyandu dan orangtua yang memiliki balita stunting di Desa Aek Tangga, Kecamatan Garoga.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Informan Kunci

Informan kunci merupakan informan yang memiliki wibawa dan pengaruh sehingga dipercaya bisa memberikan informasi terkait dengan objek yang diteliti. Informan kunci adalah orang yang paling mengetahui tentang segala aspek yang akan dikaji oleh peneliti, sehingga informan penelitian sangat diperlukan perannya dalam memberikan gambaran dari masalah yang akan diamati. Pada penelitian ini informan kuncinya adalah Kepala Desa Aek Tangga, Bapak Juspen Hasibuan.

2. Informan Utama

Informan utama adalah informan yang memiliki keterlibatan atau berinteraksi langsung dengan objek yang sedang diteliti. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah tenaga kesehatan di Desa Aek Tangga yaitu Bidan Desa Aek Tangga, Ibu Gemifitri Pasaribu dan Ibu Herlina Simanjutak

3. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah individu maupun kelompok yang bisa dijadikan sumber data atau informan yang bisa memberikan informasi pelengkap

terkait masalah penelitian. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah orangtua yang memiliki balita stunting yaitu Ibu Rosmawati Simorangkir dan Ibu Marini Pasaribu serta kader posyandu yaitu Ibu Asmina Pasaribu dan Ibu Dewi Sormin.

Tabel 5. Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Informan Kunci	Juspen Hasibuan	Kepala Desa	1 orang
2.	Informan Utama	1. Gemifitri Pasaribu 2. Herlina Simanjuntak	Bidan Desa	2 orang
3.	Informan Tambahan	1. Dewi Sormin 2. Asmina Pasaribu	Kader Posyandu	2 orang
		1. Rosmawati Simorangkir 2. Marini Pasaribu	Orangtua yang memiliki balita stunting	2 orang

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data-data dari sumber penelitian. Teknik pengumpulan data adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian, karena didalam teknik pengumpulan data nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrument penelitian. Dalam pengumpulan data tidak boleh ada kekeliruan, jika pengumpulan data dilakukan dengan benar maka data yang dihasilkan akan memiliki integritas yang tinggi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu :

1. Observasi

Sugiyono (2014:70) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. Sugiyono (2014:71) menyatakan bahwa *"through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior"*. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Observasi ini diharapkan akan memberikan data yang lebih kaya dan mendalam, sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana Peranan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Stunting di Desa Aek Tangga tersebut.

2. Wawancara

Sugiyono (2014:72) mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Yusuf (2014:372) mengemukakan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi. Wawancara

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, peneliti telah menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Data yang diperoleh dari wawancara umumnya berbentuk pernyataan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data melalui serangkaian pertanyaan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi berperan penting dalam memberikan catatan historis yang menggambarkan kejadian-kejadian yang telah berlangsung dan memberikan konteks terhadap data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan. Teknik dokumentasi adalah tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada didapatkan dari informan-informan terkait permasalahan yang diteliti. Yusuf (2014:77) mengemukakan bahwa dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data yang digunakan dan menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang

yang ada didalam suatu peristiwa, atau kejadian pada situasi sosial yang sangat berguna dalam melakukan penelitian kualitatif

4. Trianggulasi Data

Trianggulasi data merupakan teknik untuk menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sumber, metode, atau pendekatan lain di luar data yang sedang diteliti sebagai upaya validasi dan pembanding terhadap data tersebut. Sugiyono (2017:372) menyatakan bahwa triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber atau informasi lain di luar data utama, yang bertujuan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data penelitian. Dengan Trianggulasi data ini peneliti akan melakukan validasi hasil wawancara dan observasi dengan data statistik keberhasilan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Stunting di Desa Aek Tangga.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengolah data menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi sehingga informasi yang didapatkan lebih mudah dianalisis dan dipahami. Teknik analisis data dalam penelitian bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam penelitian yang sedang dilakukan dan mendapatkan kesimpulan secara keseluruhan yang didapatkan dari data yang diperoleh. Kegiatan analisis data dilakukan secara terus menerus sampai data yang diperoleh sudah jenuh. Menurut Sugiyono (2008:244) analisis data merupakan tahapan pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan berkas dokumen lain.

Aktivitas dalam analisis data menggunakan model *Miles Huberman Saldana* (2014:12-14). Adapun alur analisis datanya yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan dalam penelitian ini cukup banyak, sehingga memerlukan pencatatan yang teliti dan rinci. Seiring berjalannya waktu, jumlah dan kompleksitas data akan semakin meningkat, sehingga penting untuk segera melakukan analisis data melalui proses reduksi data. Reduksi data berarti merangkum dan memilih informasi penting, serta mencari tema dan pola yang relevan dengan tujuan penelitian. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam mengelola data, serta membantu dalam pengumpulan data selanjutnya.

Proses reduksi data dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan utama penelitian kualitatif, yaitu menemukan pola atau fenomena yang baru dan belum dikenal. Data yang dianggap asing atau tidak memiliki pola yang jelas harus menjadi fokus utama dalam proses ini. Oleh karena itu, peneliti harus lebih peka dalam memilih data yang signifikan untuk pengembangan teori. Selain itu, penggunaan alat bantu elektronik seperti komputer dapat mempercepat proses reduksi data dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Peneliti yang baru dapat mendiskusikan temuan-temuan yang ada dengan ahli atau rekan sejawat untuk memperluas wawasan dalam mereduksi data yang lebih relevan dan bernilai temuan. Penelitian ini akan mengumpulkan data mentah yang relevan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kantor Desa Aek Tangga, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara.

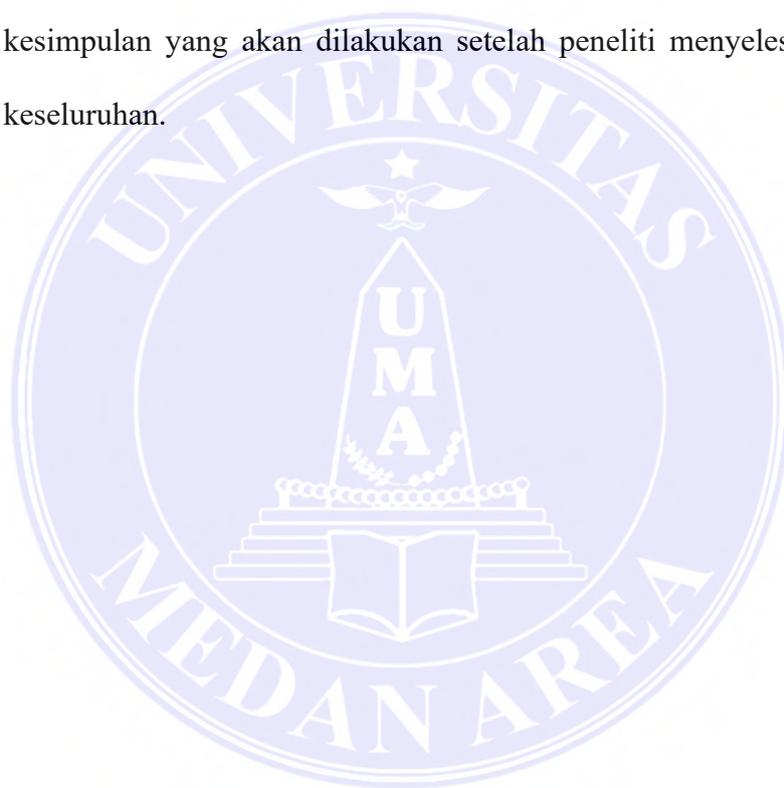
2. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data untuk mempermudah pemahaman dan analisis. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data sering dilakukan melalui tabel, grafik, piechart, pictogram, dan sejenisnya. Namun, dalam penelitian kualitatif, penyajian data lebih sering dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori *flowchart*, dan lainnya. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014), bentuk penyajian data yang paling umum dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Tahapan penyajian data merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang tersusun sebagai hasil dari informasi yang didapatkan di lapangan selama proses penelitian berlangsung. Data dan informasi yang sudah dikumpulkan kemudian disajikan sesuai data yang di dapatkan di lapangan sehingga peneliti dapat menguasai data serta menarik kesimpulan atau verifikasi akhir.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:99) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang ditarik pada tahap awal masih bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut, maka kesimpulan tersebut akan menjadi kredibel.

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan tidak selalu dapat langsung menjawab rumusan masalah yang diajukan di awal. Sebab, masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan dapat berkembang seiring dengan proses penelitian yang berlangsung di lapangan. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan seringkali dilakukan setelah proses penyajian data selesai dan seluruh data yang relevan telah dianalisis. Aplikasi di lapangan, sesuai dengan tujuan penelitian, adalah penarikan kesimpulan yang akan dilakukan setelah peneliti menyelesaikan laporan keseluruhan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pemerintah desa memainkan peran yang sangat penting dalam menekan angka stunting di Desa Aek Tangga. Berdasarkan hasil penelitian, peran ini dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan mobilisator. Peranan pemerintah desa sebagai fasilitator di Desa Aek Tangga telah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik dalam menjalankan atau melancarkan program PMT (Pemberian Makanan Tambahan), program PMT berjalan selama enam bulan di Desa Aek Tangga. Peranan pemerintah desa sebagai mobilisator berjalan dengan baik dalam mengedukasi dan menggerakkan orang tua atau remaja serta menyadarkan dan memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting. Peranan pemerintah desa sebagai regulator berjalan dengan baik melalui perannya dalam menjalankan kebijakan untuk memandu pelaksanaan upaya penurunan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan memastikan layanan berkualitas bagi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama mengenai penurunan stunting di desa.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Peranan Pemerintah Desa Aek Tangga sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator dalam upaya penanggulangan stunting sudah berjalan dengan baik. Pemerintah desa memberikan bantuan makanan tambahan, melakukan imunisasi rutin, menimbang balita setiap bulan, dan bekerja sama dengan petugas puskesmas dan petugas dinas kesehatan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan stunting dan pola hidup sehat. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya,

tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya infrastruktur kesehatan masih menjadi hambatan terhadap efektivitas program. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi yang lebih besar antara pemerintah, petugas kesehatan dan masyarakat untuk menurunkan angka stunting di desa ini.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian terkait Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting di Desa Aek Tangga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara peneliti memberikan saran sebagai berikut, pertama masyarakat harus semakin aktif terlibat dalam penyuluhan maupun edukasi yang dilakukan oleh pemerintah agar semakin sadar bahwa menjaga pola hidup yang sehat dan memperhatikan asupan gizi serta lingkungan itu sangat penting bagi anak balita agar tidak mengalami stunting. Kedua pemerintah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, membuat dan mengembangkan program yang mendorong partisipasi masyarakat agar terlibat aktif dalam penanggulangan stunting, pemerintah desa juga perlu meningkatkan anggaran untuk penanggulangan stunting dalam memperpanjang pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita stunting.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Helmyati Siti dkk. (2022). *Stunting Permasalahan dan Penanganannya*. Depok : Gadjah Mada University Press.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2014). *Community Development Alternatif Penegmbangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Kotler, P. (2016). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo
- Lakeisha Pramono, (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press
- Mangun Mardiani dkk. (2023). *Stunting*. Surabaya : Pustaka Aksara
- Maryuni dkk. (2024). *BUTATING (Buku Pintar Cegah Stunting)*. Sidoarjo. BFS Medika
- Miles and Huberman. (2017). *Pelayanan Administrasi Berbasis Han*. Jakarta: SAGE Publications
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Paskalia dan Sunanti. (2020). *Stunting dan Pencegahannya*. Klaten:
- Prawirohartono Endy. (2021). *Stunting dari Teori dan Bukti ke Implementasi di Lapangan*
- Raharjo M Muhammad (2021). *Pokok – Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa*. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Suhardhono, Edy. (2016). *Teori Peran : Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: cv. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Research & Development*. Bandung : Alfabeta.

- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta
- Winarni W. Endang (2021). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

JURNAL

- Asiva Noor Rachmayani. (2015). Peran Pemerintah Desa Dalam Penanganan Stunting Di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Good Governance Principles in Running Governance). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 64, 401–420.
- Brigitte Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Gunawan, A. R., Rachmawati, I., & Meigawati, D. (2019). Peran Dinas Perhubungan Dalam Tata Kelola Angkutan Umum Perkotaan Di Kota Sukabumi. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 103. <https://doi.org/10.23969/decision.v1i2.1748>
- Izzuddin, P. R., & Widiyarta, A. (2024). Strategi Pemerintah Desa dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.... :*Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 971–986. <http://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/288%0Ahttps://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/288/119>
- Juliyanti, E. K. (2022). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi. 9(18520136), 356–363.
- Nartin, N., & Musin, Y. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 163–172. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.23>
- Pratiwi, D. J. (2023). Strategi Pencegahan Stunting Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan. 1–97.
- Rahman, H., Rahmah, M., & Saribulan, N. (2023). Upaya Penanganan Stunting Di

Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VIII(01), 44–59.

Sihombing, L. (2022). Peranan Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Desa Lae Pinang Kabupaten Dairi.

Sukaesi Selpi. (2024). Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Stunting. 1–67.

Zakiyah Nurul. (2021). Upaya Puskesmas Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.

Zhonda Carlos. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Menurunkan Stunting AT TAWASSUTH: *Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–91.

PERATURAN

Bupati Tapanuli Utara *Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Stunting*.

Presiden Republik Indonesia *Peraturan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting*.

INTERNET

Databoks.katadata.co.id (2021). (Diakses pada 15 November 2024)

Kementerian Kesehatan RI. (2018). Buku Saku Pemantauan Status Gizi. Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017, 1-11 (Diakses pada 10 Oktober 2024)

Kementerian Kesehatan RI. (2023). (Diakses pada 07 Oktober 2024).

Redaksi Sehat Negeriku.com. (2023). (Diakses pada 15 November 2024)

LAMPIRAN

Gambar 1. Dokumentasi dengan Kepala Desa Aek Tangga



Gambar 2. Dokumentasi dengan Bidan Desa Aek Tangga



Gambar 3. Dokumentasi dengan Kader Posyandu



Gambar 4. Dokumentasi dengan Orangtua yang memiliki balita stunting



SURAT PENGANTAR RISET DARI UNIVERSITAS MEDAN AREA

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 4158/FIS.2/01.10/XII/2024 Medan, 24/12/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth.
Kepala Desa Aek Tangga Kecamatan Garoga
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Dinda Cantika Sormin
NIM : 218520026
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Desa Aek Tangga Kecamatan Garoga untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

“ PERANAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA AEK TANGGA KECAMATAN GAROGA KABUPATEN TAPANULI UTARA”

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Dr. Selamet Riadi, SE, M.I.Kom

Tembusan:
1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

SURAT SELESAI RISET DARI KANTOR KEPALA DESA AEK TANGGA

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**
KECAMATAN GAROGA
DESA AEK TANGGA

SURAT KETERANGAN
Nomor: *704/12.02.14/2011/01/2025*

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : JUSPEN HASIBUAN
Jabatan : KEPALA DESA AEK TANGGA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Dinda Cantika Sormin
NIK : 1202145411020001
Umur : 22 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
NPM : 218520026
Alamat : Desa Sibaganding

Telah selesai melakukan riset/ penelitian di Desa Aek Tangga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara 27 Desember 2024 sampai tanggal 12 Januari 2025 dengan judul penelitian : **Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Stunting di Desa Aek Tangga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara.**

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan sebagaimana semestinya.

Aek Tangga, 15 Januari 2025


JUSPEN HASIBUAN

PEDOMAN WAWANCARA

No	Informan	Pertanyaan
1.	Kepala Desa (Informan Utama)	<p>a. Fasilitator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah desa dalam upaya penanggulangan stunting di wilayah desa ini? 2. Sebagai Kepala Desa, Bagaimana Bapak memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan seperti posyandu dan pemeriksaan tumbuh anak kesehatan dan nutrisi bagi anak-anak dan ibu hamil? 3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah desa, puskesmas, dan lembaga lain dalam penanganan stunting dan bagaimana Anda memfasilitasi koordinasi antara berbagai pihak, seperti puskesmas, kader posyandu, dan masyarakat, dalam menangani masalah stunting di desa? 4. Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk mempermudah masyarakat, terutama ibu hamil dan ibu dengan balita, dalam mendapatkan informasi tentang gizi yang tepat untuk mencegah stunting? Apakah ada kegiatan edukasi yang difasilitasi oleh desa? 5. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang untuk mencegah stunting, dan bagaimana Anda sebagai kepala desa membantu mengatasi tantangan tersebut? <p>b. Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisitor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai kepala desa, bagaimana Anda menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli dan aktif dalam upaya pencegahan stunting di desa ini? 2. Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk memastikan bahwa ibu hamil dan ibu dengan balita berpartisipasi dalam kegiatan posyandu dan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah stunting? 3. Bagaimana Anda menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap pemberian makanan bergizi bagi balita, seperti pemberian makanan tambahan atau

		<p>peningkatan pola makan yang sehat dan memahami pentingnya pemberian ASI Eksklusif dalam pencegahan stunting?</p> <p>c. Peran Kepala Desa Sebagai Regulator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa kebijakan atau regulasi yang telah Anda tetapkan di tingkat desa untuk mendukung upaya pencegahan stunting, misalnya dalam hal pemenuhan gizi, perawatan ibu hamil, atau pemantauan tumbuh kembang anak? 2. Bagaimana Anda mengatasi potensi kendala atau hambatan yang muncul dalam penerapan kebijakan atau regulasi desa terkait pencegahan stunting, baik dari sisi anggaran, SDM, maupun dukungan masyarakat? 3. Dalam upaya pencegahan stunting, bagaimana Anda mengatur penggunaan anggaran desa untuk program kesehatan, termasuk kegiatan posyandu dan penyuluhan gizi?
2.	Bidan Desa (Informan Utama)	<p>a. Peran Bidan Desa Sebagai Fasilitator</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai bidan desa, bagaimana Anda bekerja sama dengan pihak lain (seperti kepala desa, kader kesehatan, dan puskesmas) untuk memfasilitasi program-program pencegahan stunting di desa ini? b. Apa upaya yang Anda lakukan untuk memfasilitasi pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu? Sejauh mana Anda bekerja sama dengan kader posyandu untuk memastikan anak-anak mendapatkan pemeriksaan rutin yang dapat mendeteksi dini risiko stunting? c. Bagaimana Anda memfasilitasi keluarga yang menghadapi kendala untuk mengikuti posyandu atau layanan kesehatan, misalnya karena keterbatasan transportasi atau ekonomi? Apakah ada solusi yang Anda tawarkan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini? d. Sejauh mana Anda terlibat dalam memfasilitasi kolaborasi antara masyarakat dan layanan kesehatan untuk menangani masalah stunting? Apa peran Anda dalam menciptakan hubungan yang baik antara keluarga dengan layanan kesehatan desa? <p>b. Peran Bidan Desa Sebagai Mobilisator</p>

		<ol style="list-style-type: none">1. Sebagai bidan desa, bagaimana Anda memobilisasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap pentingnya pencegahan stunting, terutama dalam hal pemenuhan gizi yang baik bagi ibu hamil dan balita?2. Apa upaya yang Anda lakukan untuk mengajak ibu hamil dan keluarga dengan balita mengikuti kegiatan posyandu atau pemeriksaan kesehatan yang bertujuan mencegah stunting? Apakah ada strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi mereka?3. Apakah Anda berperan dalam mengorganisir kampanye atau sosialisasi yang mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan pemberian ASI eksklusif dan gizi yang seimbang bagi anak-anak mereka? Bagaimana Anda memobilisasi masyarakat untuk mengikuti program ini?4. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam memobilisasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan stunting? Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan meningkatkan partisipasi masyarakat? <p>c. Peran Bidan Desa Sebagai Regulator</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sebagai bidan desa, apakah Anda terlibat dalam pengembangan atau penerapan kebijakan desa yang berkaitan dengan pencegahan stunting? Jika ya, kebijakan apa yang telah diterapkan di desa ini untuk mendukung upaya pencegahan stunting?2. Bagaimana Anda memastikan bahwa kebijakan atau regulasi terkait kesehatan ibu dan anak, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan stunting, diterapkan dengan baik di tingkat desa? Apakah ada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Anda sebagai bidan desa?3. Bagaimana Anda berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, seperti kepala desa, kader posyandu, atau puskesmas, untuk memastikan bahwa peraturan atau kebijakan yang ada terkait stunting dijalankan dengan baik dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku?
--	--	---

<p>3</p>	<p>Informan Tambahan (Kader Posyandu dan Orangtua yang memiliki balita stunting)</p>	<p>a. Fasilitator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kepala desa memfasilitasi kegiatan posyandu yang bertujuan untuk mencegah stunting? Apakah kepala desa menyediakan dukungan berupa sumber daya atau fasilitas untuk mendukung kegiatan ini? 2. Bagaimana kepala desa berperan dalam memfasilitasi akses masyarakat, terutama ibu hamil dan keluarga dengan balita, untuk mengikuti kegiatan posyandu dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang diperlukan untuk mencegah stunting? 3. Apa bentuk bantuan atau dukungan yang diberikan oleh kepala desa untuk memfasilitasi kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting, seperti distribusi makanan bergizi atau bantuan kesehatan untuk balita 4. Apakah kepala desa berperan dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan posyandu dan pencegahan stunting? Bagaimana cara kepala desa memotivasi masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan anak-anak mereka? 5. Apakah ada kebijakan atau aturan yang dibuat oleh kepala desa untuk memastikan bahwa kegiatan pencegahan stunting, seperti pemeriksaan gizi dan pemberian suplemen, dilakukan secara rutin di posyandu? Bagaimana peran kepala desa dalam memastikan aturan ini diterapkan? 6. Apakah kepala desa pernah mengorganisir kegiatan yang memfasilitasi pertemuan antara orangtua, kader posyandu, dan tenaga kesehatan untuk membahas cara-cara mengatasi masalah stunting? Bagaimana peran kepala desa dalam mempermudah atau mengorganisir kegiatan tersebut? <p>b. Mobilisator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai orangtua yang memiliki balita stunting, bagaimana kepala desa memobilisasi masyarakat di desa ini untuk lebih peduli terhadap masalah stunting? Apakah kepala desa mengajak Anda dan keluarga untuk lebih aktif dalam program pencegahan stunting?
----------	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana kepala desa menggerakkan masyarakat, termasuk keluarga seperti Anda, untuk berpartisipasi dalam kegiatan posyandu atau pemeriksaan kesehatan rutin? Apakah kepala desa memberikan motivasi atau dukungan khusus untuk memastikan masyarakat mengikuti kegiatan ini? 3. Bagaimana kepala desa berperan dalam menggerakkan keluarga-keluarga lain untuk berpartisipasi dalam program pemberian makanan bergizi atau bantuan gizi untuk balita? Apakah Anda merasa didorong untuk mengikuti program ini berkat upaya kepala desa? 4. Apakah kepala desa mengorganisir kegiatan atau kampanye di tingkat desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang stunting? Jika ada, bagaimana kegiatan tersebut mempengaruhi Anda sebagai orangtua dalam merawat balita yang mengalami stunting? 5. Bagaimana kepala desa memobilisasi kader posyandu atau tenaga kesehatan untuk lebih aktif dalam mendekati keluarga dengan balita stunting dan memberikan mereka perhatian atau bantuan khusus? Apakah Anda merasa lebih diperhatikan berkat upaya tersebut? 6. Sejauh mana kepala desa menggerakkan masyarakat untuk mengikuti kegiatan posyandu secara rutin? Apakah kepala desa terlibat dalam mengorganisir atau mengkoordinasikan jadwal dan pelaksanaan kegiatan posyandu di tingkat desa? <p>c. Regulator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kepala desa telah menetapkan kebijakan atau aturan yang mendukung kegiatan posyandu dalam mencegah stunting? Sejauh mana kebijakan tersebut membantu dalam pelaksanaan program di tingkat desa? 2. Bagaimana kepala desa mengawasi atau memastikan bahwa setiap keluarga, terutama ibu hamil dan balita, mendapatkan akses yang cukup terhadap layanan posyandu yang bertujuan mencegah stunting?
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">3. Bagaimana kepala desa memastikan bahwa kegiatan posyandu dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di desa ini sesuai dengan peraturan atau pedoman yang berlaku, baik dari pemerintah pusat maupun daerah?4. Bagaimana kepala desa mengatur atau mendukung distribusi makanan bergizi atau bantuan lainnya bagi keluarga yang rentan terhadap stunting, misalnya keluarga miskin atau yang berada di daerah terpencil?5. Apakah kepala desa menetapkan peraturan yang mengharuskan setiap ibu hamil dan ibu dengan balita untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan secara rutin di posyandu? Bagaimana Anda menilai pelaksanaan peraturan tersebut?
--	--	---

